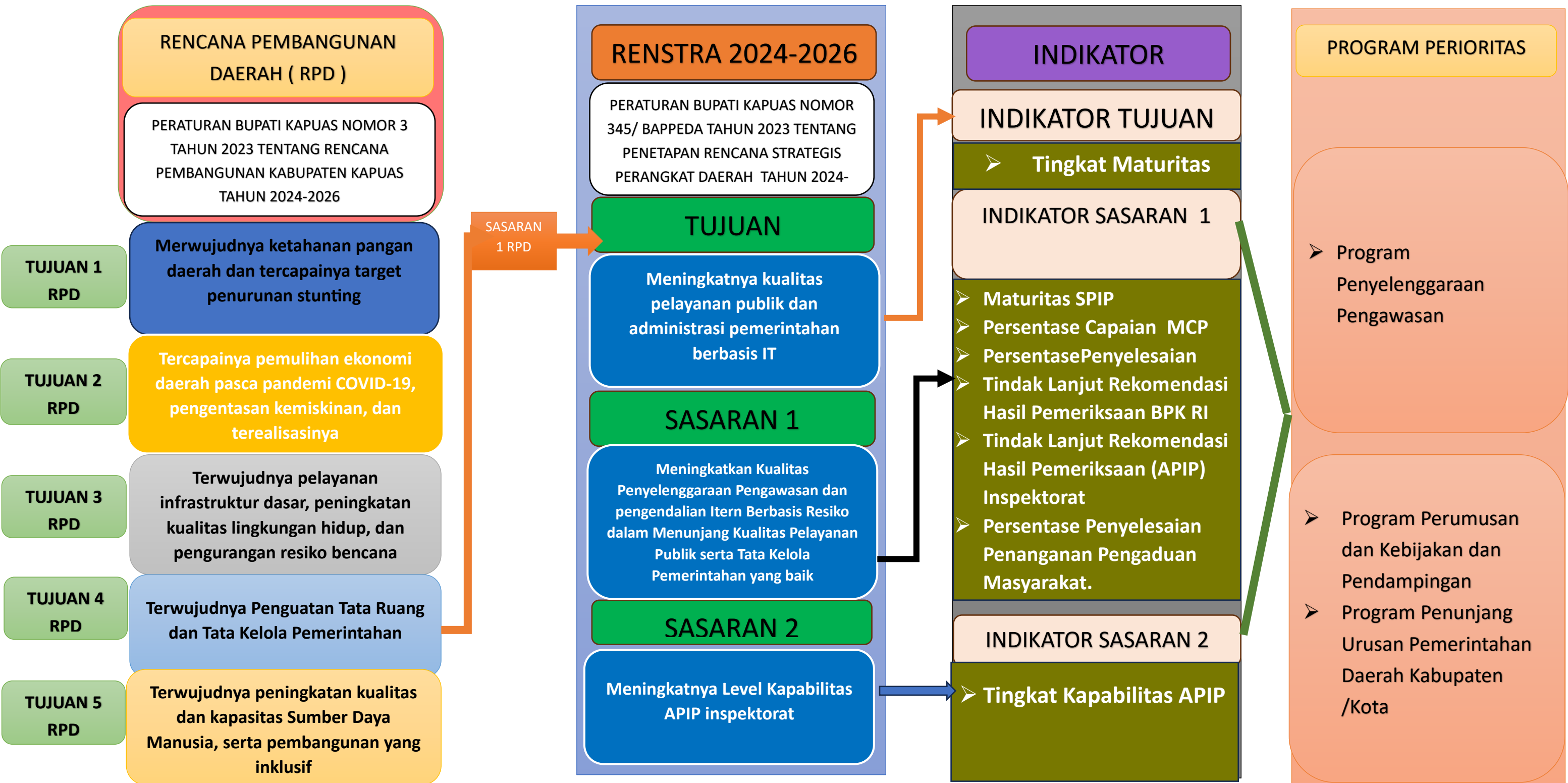


**KETERKAITAN RPD KABUPATEN KABUPATEN KAPUAS DENGAN
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 – 2026**



Matrik Kinerja

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN SUB. KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR SUB. KEGIATAN
Meningkatnya Kuaitas Pelayanan Publik dan administrasi Pemerintahan Berbasis IT	Tingkat Maturitas SPIP											
			Maturitas SPIP	Meningkatnya Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SOPD yang mencapai Level 3 Maturitas SPIP	Terlaksananya Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Secara Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Yang dilakukan sesuai PKPT dan berstandar audit	Terlaksnanya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	JUmlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Intern Berbasis Resiko dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Punlik serta tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Capaian MCP	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase Realisasi Penyelenggaraan Pengawasa Berdasarkan PKPT / Non PKPT				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
										Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
										Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
										Terlaksananya Pengawsan Desa	Pengawsan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
										Terlaksanya Pengawasan Kinerja Internal	Pengawasan Kinerja Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						

			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendas i Temuan Hasil Pemeriksaan (APIP) Inspektorat			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendas i Temuan Hasil Pemeriksaan (APIP) Inspektorat											
			Persentase Penyelesaian Penangana Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Penangann Pengaduan Masyarakat Yan ditindak Lanjuti		Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditidaklanjuti	Terselenggara nya Pengawasna dengan Tujuan Tertentu						Penyelenggara an Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah	Jumlah Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani
				Meningkatnya Tata Laksana Sistem Manajemen Penguatan Pengawasan Serta Penegakan Tindak KKN		Persentase Pegawai yang Menyampaik an LHKPN									Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tetentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tetentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			Meningkatny a Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Tingkat Kapabilitas APIP		Meningkatnya Pengendalian Resiko Perangkat Daerah	Program Perumusan dan Kebijakan dan Pendampingan						Persentase Perangkat SDaerah yang Menerapkan SPIP	Meningkatnya Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Inspektorat	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Teknis Dibidang pengawasan dan Fasilitasi	Terlaksananya Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengawasan Berbasis Resiko	Jumlah Dokumen PKPT berbasis Resiko															
					Terlaksnanya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dioakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintah								
					Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Pendampinga n, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								

							Meningkatnya Peran Konfrenhensif Inspektorat	Pendampingan dan Asistensi	Jumah Tersedianya Dokumen Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
										Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampinga n, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
				Meningkatnya Kualitas Pelyanan Punlik Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM	Meningkatnya Kemampuan Kopetensi SDM INspektorat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP yang Mengikuti Diklat JFA, Penjenjangan, Sertifikasi, Bimtek, dan Workshop	Terlaksnannya Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas FungsiTugas	Pendidkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pelatihan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
										Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumah Orang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Imlementasi Peraturan Perundanga-undangan						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD			Persentase SAKIP Di Ispektorat yang Minimal Bernilai B	Meningkatnya Sarana dan prasarana dan layanan administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan ketersediaan sarana prasarana perangkat daerah			

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024-2026**



CASCADING INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Terwujudnya Penguatan Tata Ruang dan Tata Kelola

TUJUAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT

KEPALA DAERAH
(RPD 4)

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Intern Berbasis Resiko dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik serta tata Kelola Pemerintahan yang Baik

INDIKATOR SASARAN :

- Maturitas SPIP
- Persentase Capaian MCP
- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI
- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan (APIP) Inspektorat
- Persentase Penyelesaian Penangana Pengaduan Masyarakat

- Meningkatkan Maturitas SPIP
- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan
- Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- Meningkatkan Penangann Pengaduan Masyarakat Yan ditindak Lanjuti
- Meningkatkan Tata Laksana Sistem Manajemen Penguatan Pengawasan Serta Penegakan Tindak KKN

- Meningkatkan Pengendalian Resiko Perangkat Daerah

SASARAN 2

Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat

Tingkat Kapabilitas APIP

INSPEKTUR
(ESELON .II)

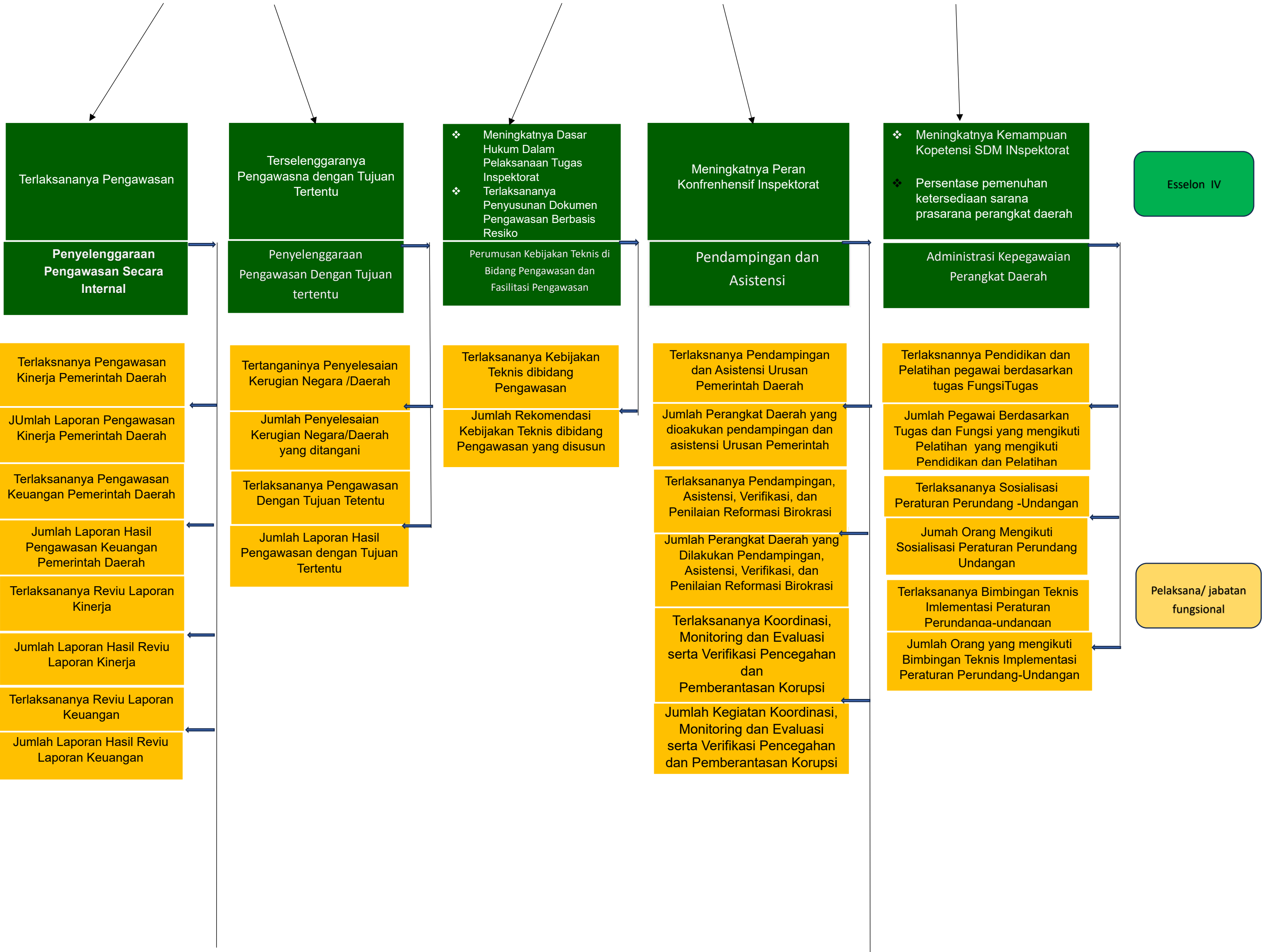
- Meningkatkan Pengendalian Resiko Perangkat Daerah

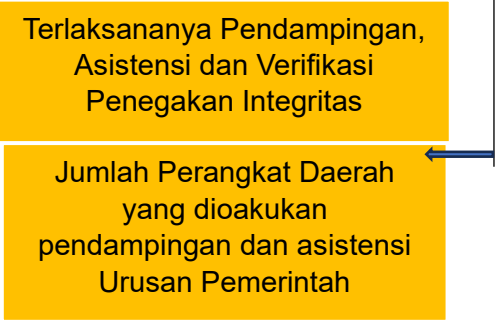
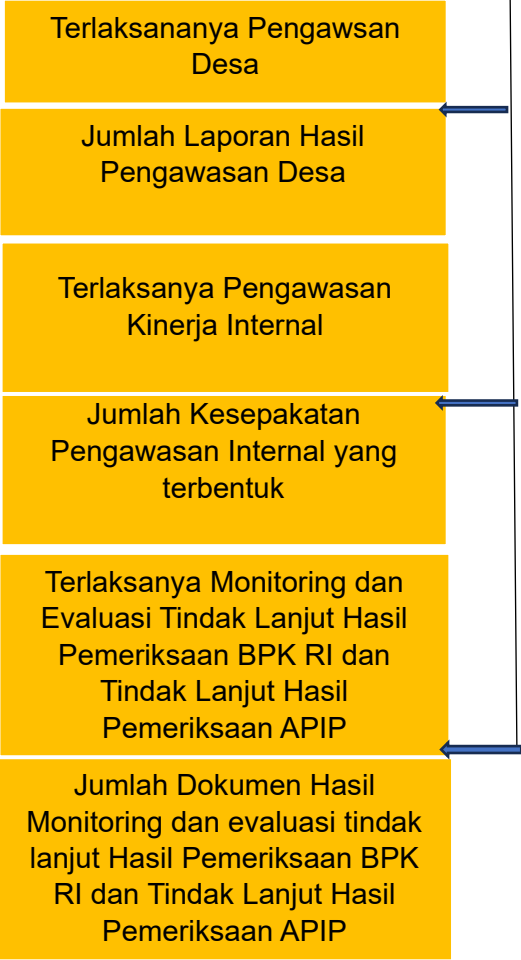
- Persentase Perangkat SDaerah yang Menerapkan SPIP

- Meningkatkan Kualitas Pelyanan Punlik Inspektorat
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM
- Persentase SAKIP Di Ispektorat yang Minimal Bernilai B

(ESELON .III)





CROSS CUTTING

Terwujudnya Penguatan Tata Ruang dan Tata

Ultimet Ouame

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT

Intermed Ouame

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Intern Berbasis Resiko dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik serta tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat

- Meningkatnya Maturitas SPIP
- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan
- Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- Meningkatnya Penangann Pengaduan Masyarakat Yan ditindak Lanjuti
- Meningkatnya Tata Laksana Sistem Manajemen Penguatan Pengawasan Serta Penegakan Tindak KKN

Meningkatnya Pengendalian Resiko Perangkat Daerah

- Meningkatnya Kualitas Pelyanan Punlik Inspektorat
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Intermat Ouame

Intermat Ouame

Output

Kegiatan

Penyelenggaraan Pengawasan Secara Internal

Sub. Kegiatan

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Kegiatan

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan

Sub. Kegiatan

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah

Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sub. Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan

Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Sub. Kegiatan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub. Kegiatan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub. Kegiatan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

